Bab II

Hubungan Diplomatik Dan Sejarah

Pemberian ODA Jepang Untuk Indonesia

Hubungan antara Jepang dengan Indonesia diawali dengan penjajahan 3,5 tahu yang dilakukan Jepang terhadap Indonesia pada masa Perang Asia Pasifik. Hubungan i kemudian resmi menjadi hubungan diplomatik setelah Indonesia memproklamasika kemerdekaaannya sebagai negara yang berdaulat. Dalam proses berjalannya, hubung ini tidaklah mulus-mulus saja, namun juga mengalami pasang surut.

Salah satu hasil yang sangat penting dari hubungan ini adalah pemberian OD dari Jepang terhadap Indonesia untuk membantu proyek-proyek pembangunan Indonesia sebagai negara berkembang. Walaupun pada filosofi awalnya ODA adal ganti rugi pampasan perang, sebagai aktor rasional tentu saja Jepang tidak semata-ma memberikannya secara cuma-cuma. Pemberian ODA Jepang terhadap Indonesia seca berkesinambungan jelas menunjukkan bahwa Jepang membutuhkan Indonesia unt memenuhi kepentingan nasional Jepang itu sendiri.

A. Dinamika Perkembangan Hubungan Diplomatik Jepang-Indonesia

Pada tanggal 1 Maret 1942, sebelum matahari terbit, Jepang mulai mendarat

dengan kekuatan lebih kurang satu divisi. Pada awa
adalah mencari bahan-bahan keperluan perang.
dengan antusias oleh rakyat Indonesia. Kedatangan
rakyat Indonesia yang saat itu telah menaruh kebe
adanya dukungan terhadap perang gerilya yan
mempertahankan Pulau Jawa ikut memudahkan
Indramayu, dengan cepat Jepang berhasil mere
dipersiapkan sebagai pangkaan pesawat. Hingga ak
17, upacara serah terima kekuasaan dilakukan a
Kalijati.

1. Pra Kemerdekaan Republik Indones

Kedatangan Jepang ke Indonesia yang awal
bahan keperluan perang berubah menjadi rasa ser
daya yang ada di Indonesia. Ketamakan ini te
melakukan kolonialisasi terhadap Indonesia. M
perubahan di Indonesia untuk mencapai tujuan
dengan membentuk organisasi militer dan semi m
undangan yang menetapkan adanya suatu peme
pemerintahan lama yang telah ada sebelumnya, m
dari pembekalan perangnya, serta men-Jepang-kan
(seperti mengubah penentuan tanggal, tahun, ja

Hasil daripada kolonialisasi dan perubahan di Indonesia ini malah mengakibatkan semakin bertambahnya penderitaan rakyat Indonesia selepas jajahan Belanda. Gambaran kekejaman karakteristik penjajahan Jepang dapat dilihat dari bukti bukti konkrit yang ada, seperti penderitaan yang dialami para Romusha, Jugu Tianfu, dan Tentara Paksaan. *Romusha* merupakan para orang Indonesia yang melakukan kerja paksa dan berat dengan tanpa memperoleh cukup makan, minum dan istrahat hingga ajalnya tiba. Lalu ada *Jugu Tianfu* yang merupakan para wanita Indonesia yang dipaksa menjadi pelayan nafsu birahi dari para tentara Jepang, hingga tidak sedikit dari mereka yang kemudian mengalami penyakit pada daerah kelamin serta kekerasan seksual yang terus menghantui seumur hidup mereka. Sedangkan *Tentara Paksaan* adalah para pemuda Indonesia yang dipaksa menjadi tentara Jepang untuk ikut berperang dalam perang Asia Pasifik dan banyak yang kemudian tewas sia-sia karena bekal pengalaman berperang yang sangat minim.

Jepang memang sangat ingin selalu menguasai Indonesia karena berbagai kekayaan sumber alam yang di miliki oleh indonesia. Oleh karenanya, ketika Jepang pada akhirnya ingin memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, mereka baru akan memberikannya jika mereka sudah yakin bahwa pemimpin Indonesia bersedia menjadi pengikut setia Jepang atau dengan kata lain Indonesia di jadikan sebgai "negara boneka" Jepang. Memang pada awalnya Jepang telah memberikan janji kepada Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia "pada suatu hari nanti". Ini adalah sebuah janji yang sangat mengambang dan tidak adanya suatu kepastian yang

momentum dalam kesempatan ini untuk segera merdeka menjadi negara yang berdaulat. Kehadiran Jepang di Indonesia telah mengajarkan dan memberikan semangat kepada bangsa Indonesia untuk merdeka dan menolak kedatangan penjajah – penjajah lain ke Indonesia lagi. Hingga akhirnya di adakanlah rapat PPKI pada 17 Agustus 1945 yang menghasilkan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang di tandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah pembacan naskah proklamasi, maka Indonesia dinyatakan merdeka dan berita kemerdekaan Indonesia di umumkan ke seluruh Indonesia dan dunia lewat alat komunikasi yang dimiliki oleh Jepang.

2. Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia

Periode setelah kemerdekaan, hubungan diplomatik Jepang dengan Indonesia berlangsung secara naik turun. Perselisihan, perbedaan, dan masalah antar kedua negara sering muncul dalam melaksanakan kerjasama bidang politik maupun ekonomi baik itu dalam tingkat bilateral maupun multilateral. Sebut saja seperti dalam peristiwa malapetaka 15 Januari 1974 atau yang lebih dikenal dengan sebutan "Peristiwa Malari", yaitu peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial tentang antimodal asing yang disertai dengan kerusuhan, penjarahan, dan pembakaran sewaktu Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakuei sedang berkunjung ke Jakarta. Lalu juga mengenai protes dan permintaan ganti rugi daripada korban yang menjadi Jugu lanfu (wanita penghibur dalam masa penjajahan Jepang) kepada pemerintah Jepang.

Setelah melalui serangkaian hubungan diplomatik yang dinamis, kedua negara akhirnya berhasil membina hubungan persahabatan yang sangat erat yang berlandaskan

impor, kebudayaan dan sebagainya. Pada kegiatan pentas seni dan budaya Indonesia, yang digelar pada tanggal 12 Mei 2007, bertempat di Yotsuyakumin Hall-Shinjuku, pihak kedutaan besar Indonesia memberikan dukungan sepenuhnya untuk kesuksesan acara yang dibarengi juga dengan sosialisasi untuk perayaan hubungan diplomasi antara Indonesia-Jepang yang telah memasuki tahun emas. Perayaan 50 tahun hubungan diplomatik ini tepatnya jatuh pada tahun 2008 Pada peringatan hubungan diplomatik tahun emas tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Tokyo, Jepang. Indonesia dan Jepang telah menjalin hubungan kerjasama luar negeri sejak tahun 1958. Hal ini ditunjukkan dengan semakin bertambahnya jumlah mahasiswa Indonesia yang sekolah di Jepang dan juga sebaliknya, serta banyaknya pengusaha Jepang yang membangun kegiatan bisnisnya di Indonesia, sehingga dapat menjadi jembatan baru antara Indonesia dan Jepang dalam mempererat hubungan diplomasi antara kedua negara. Hubungan RI-Jepang pun juga telah disosialisasikan secara meluas, seperti pemberian dukungan pada beberapa kegiatan pergelaran seni dan budaya Indonesia oleh Persatuan Pelajar Indonesia-Jepang, serta peluncuran Access TV-MNC RCTI Indonesia. Di Indonesia sampai tahun 2011 ada sekitar 11.000 orang Jepang, sebaliknya di Jepang terdapat lebih 24.000 orang Indonesia. Perusahaan-perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia berjumlah lebih dari 1000 perusahaan, di mana bekerja 300.000 orang Indonesia. Sementara itu, di Indonesia terdapat lebih dari 85.000 orang yang belajar Bahasa Jepang, jumlah ini terbesar di Asia Tenggara dan menempati kedudukan ke-6 di dunia.[11]

---

[11] *Hubungan Indonesia Dengan Jepang*, 2011, Wikipedia

Sejumlah kerjasama antara kedua negara nampak ditingkatkan. Pada bidang ekonomi misalnya, Indonesia dan Jepang telah sepakat untuk membentuk kerangka bagi pengembangan kerjasama kemitraan, antara lain melalui pembentukan *Free Trade Area* (FTA) dalam jangka waktu 10 tahun yang ditandai dengan penandatanganan *Joint Declaration on ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership* (CEP). Indonesia dan Jepang juga menyepakati untuk menuntaskan perundingan Economic Partnership Agreement (EPA). [12] EPA merupakan kerjasama ekonomi di bidang investasi, perdagangan, perindustrian dan energi serta jasa.

Dalam bidang budaya dan pendidikan, Indonesia dan Jepang telah meningkatkan hubungannya yang sudah terjalin baik seperti pertukaran kebudayaan dan seni dan terbangunnya lembaga persahabatan kedua negara. Indonesia dan Jepang mengintensifkan pertukaran pelajar dan pembinaan olahraga bagi pemuda. Yoshinori Katori, Dubes Baru Jepang untuk Indonesia, menjabarkan, saat ini jumlah pelajar Indonesia yang belajar di Jepang hanya 2.119 orang[13]. Sementara itu, jumlah pelajar Jepang di Indonesia sangat sedikit. Dia berharap, jumlah pelajar akan meningkat dalam waktu dekat karena peningkatan itu merupakan salah satu misinya.

Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, salah satunya adalah Proyek Tanahdatar ditetapkan menjadi daerah pilot project komunikasi dan informatika. Tahun

---

http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_Indonesia_dengan_Jepang.. diakses tanggal 26 November 2011.

[12] *Hubungan Diplomasi Indonesia Dengan Jepang*. 2011. PPI Kanto. http://ppikanto.org/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=36:hubungan-diplomasi-indonesia-dengan-jepang&catid=23:artikel&Itemid=52.. diakses tanggal 28 November 2011.

[13] Akbar Aulia. *Dubes Baru Jepang Fokuskan Kerjasama Pendidikan*. 2011. News Kampus. http://kampus.okezone.com/read/2011/06/10/373/466927/dubes-baru-jepang-fokuskan-kerja-sama-pendidikan, diakses tanggal 28 November 2011.

ini, 12 kecamatan di Tanahdatar akan mendapatkan bantuan mobil untuk pengembangan IT di Tanahdatar. Semua ini adalah wujud keberhasilan Tanahdatar dalam pengembangan teknologi informasi (TI) di daerah tersebut. Proyek ini terselenggara berkat komitmen pemkab setempat bekerja sama dengan Asia Pasific Telecommunity (APT), pemerintah Jepang dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Manfaat kerja sama IT ini telah mulai dirasakan keberadaannya di Tanahdatar. Seperti di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan serta membangun pusat pendidikan sebagai media informasi teknologi bagi masyarakat.

Segi politik tidaklah kalah pentingnya dengan ekonomi dan budaya. Hal ini mencakup tentang apa saja kira-kira retribusi politik yang diberikan oleh Jepang kepada Indonesia dan begitu pula sebaliknya. Jepang memiliki kekuatan politik saat ini di dunia pada umumnya dan di Asia khususnya. Meski terlihat ironis, Indonesia tidak selalu negatif dalam penerapan politiknya. Memang dalam kerjasamanya dengan Jepang, Indonesia terlihat tidak maksimal dalam penerapan politiknya, tetapi tidak seratus persen hal itu benar karena Jepang juga memuji politik luar negeri yang dilakukan Indonesia terhadap Jepang, karena sesungguhnya akan menguntungkan Indonesia juga terutama dalam sektor perdagangan. Dalam beberapa tahun Indonesia dan Jepang sering mengadakan pertemuan sesama anggota parlemen dari masing-masing negara. Kedua belah pihak sama-sama melakukan studi banding untuk mempelajari situasi dan menganalisa bagaimana sebuah sistem pemerintahan berjalan di tiap-tiap negara. Sampai saat ini, kebanyakan hubungan kerjasama politik antara Indonesia dan Jepang adalah

penandatanganan perjanjian (traktat), tukar menukar Duta Besar, dan kunjungan kenegaraan. Alternatif diplomasi lainnya adalah multilateral,yang melibatkan banyak negara dan unilateral, jika satu negara bertindak sendiri.

Dari segala jenis hubungan bilateral yang terjadi , pemberian ODA (Officials Development Assistance) Jepang kepada Indonesialah yang merupakan hubungan paling krusial yang memberikan keuntungan secara signifikan bagi kedua belah pihak. Indonesia membutuhkan ODA untuk pembangunan negara, sebaliknya Jepang membutuhkan Indonesia untuk memperkuat posisi perekonomiannya di dunia.

3. ODA (Official Development Assistance) Jepang

Sebagai salah satu negara maju di dunia, Jepang memiliki keunggulan dalam sisi ekonomi. Kemampuan ekonomi Jepang yang kuat membuat Jepang sebagai negara yang banyak memberikan bantuannya kepada negara-negara berkembang melalui sebuah lembaga bantuan bilateral yang dinamakan ODA (Officials Development Assistance). ODA disalurkan Jepang untuk membantu negara-negara miskin dan berkembang.

Development Assistance ini muncul karena adanya gap antara negara kaya dan negara miskin, dimana bantuan yang diberikan berdasarkan *charity* (Belas Kasihan) dalam konsep hubungan antara manusia (dalam skala kecil). Dalam skala besar, bantuan yang diberikan adalah berdasarkan *loan* (Pinjaman). Hal ini yang membedakan antara

1. Sejarah Dan Filosofi

Sementara menerima bantuan dari Bank Dunia di tahun 1950-an untuk membangun negaranya kembali, Jepang mulai menyediakan bantuan ke negara-negara sedang berkembang. Bantuan Pembangunan Resmi Pemerintah Jepang ini dimulai tahun 1954, saat bergabung dengan Colombo Plan, sebuah organisasi yang dibentuk pada tahun 1950 untuk membantu negara-negara Asia di bidang pembangunan sosial ekonomi. Tahun 1955, Jepang mulai memberikan bantuan pelatihan dan tenaga ahli, lalu tahun 1958, pemerintah Jepang mulai memberikan pinjaman dana bagi India, sekaligus menjadikan India, sebagai negara berkembang pertama yang menerima pinjaman dari Jepang.

Pada awal perkembangannya di tahun 1960-an, ODA diarahkan sebagai sarana penunjang ekspansi perdagangan ke luar negeri. Dulu sifat bantuan adalah *tied loan* yang mensyaratkan seluruh pengadaan barang dan kontraktor harus berasal dari Jepang. Periode ini sangat penting bagi Jepang. Karena Jepang berhasil menempatkan dirinya sebagai anggota dunia non komunis dan Jepang berusaha memperoleh pengakuan sebagai pemimpin dunia internasional dengan memperluas cakupan geografis dan sektoral program bantuan ekonominya. Dengan demikian bantuan yang diberikan pemerintah Jepang sejak tahun 1970-an telah mengalir ke kawasan negara berkembang.

tersalurkan dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 1989 Jepang mengalahkan AS sebagai donor terbesar di dunia dengan sejumlah 8 milyar dollar AS.[14]

2. Karakteristik

Jepang melaksanakan pemberian bantuan ODAnya melalui karakteristik tertentu yang meliputi fase, jenis, dan sistim penyalurannya sebagai berikut:

a. Fase – Fase Kebijakan

Peranan bantuan ekonomi dalam hubungan politik maupun ekonomi Jepang dengan negara-negara penerima bantuan banyak mengalami perubahan sejak berakhirnya perang dunia ke II hingga kini ada 4 fase kebijakan bantuan ekonomi Jepang melalui ODA.[15]

Fase Pertama ; periode reparasi dimulai pada tahun 1960-1965 dimana bantuan ekonomi diberikan dalam bentuk pembayaran kerugian perang kepada negara Asia.

Fase Kedua ; periode promosi ekspor mulai pertengahan tahun 1950-an hingga awal tahun 1970-an yang ditandai dengan bantuan mengikat (tied loan) yang digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan ekspor ke negara-negara penerima bantuan.

Fase Ketiga ; periode diplomasi sumber alam yang dimulai tahun 1975-1980.

Fase Keempat ; merupakan periode kebijakan kebutuhan dasar. Dimana program-program bantuan ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan "kemanusiaan di negara" yang menempati posisi strategis bagi Jepang.

Masalah ini terkait dengan hutang. Bantuan yang diberikan perkembangannya tidak diberikan sebagai bantuan. *Development Assistance* merupakan salah satu konsep yang dibawa melalui institusi Internasional. Ide ini muncul ketika banyak negara berkembang yang merasa perlu untuk mengadakan pembangunan (tahun 60-70) terutama Amerika Latin.[16]

Ketika ekonomi Jepang mulai kukuh dan mengglobal, maka bantuan Jepang juga dijadikan alat pendukung politik luar negeri. Dalam perkembangannya, bantuan resmi pembangunan atau ODA disalurkan tidak hanya melalui pemerintah suatu negara (*Bilateral*), tapi juga institusi internasional (*Multilateral*). Karena Jepang memerlukan dukungan dari institusi internasional tersebut untuk mencapai target kepentingannya dengan lebih efektif.

b. Jenis Bantuan

Terhadap Negara-negara penerima donor, Jepang memberikan berbagai macam bentuk bantuan, seperti memberikan bantuan dana dan teknik yang dibutuhkan untuk pembangunan sosial ekonominya. Demikian pula halnya dukungan untuk membantu para korban bencana, pendidikan dan kesehatan. Jenis Bantuan yang dilakukan Jepang adalah dengan :

1. Pinjaman Yen (Loan Yen)

Pinjaman Yen adalah, pinjaman dana dengan persyaratan ringan, yaitu berjangka panjang dan berbunga rendah, yang dibutuhkan negara berkembang, dalam rangka menata fondasi sosial ekonominya, yang akan menjadi dasar dari pembangunan.

Pinjaman Yen ini dilaksanakan melalui, Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

2. Bantuan Dana Hibah (Grant Aid)

Bantuan hibah adalah bantuan investasi yang berbentuk proyek fisik (bangunan, peralatan, dsb) yang diberikan ke negara-negara yang sedang berkembang tanpa kewajiban membayar kembali, dan merupakan bagian utama dari ODA bilateral Jepang. JICA bertanggung jawab atas pelaksanaan studi desain dasar untuk menyusun draft proposal yang diperlukan untuk menentukan pelaksanaan proyek bantuan hibah. Setelah penandatanganan Nota Pertukaran (perjanjian resmi antara Jepang dengan pemerintah negara penerima untuk implementasi proyek), JICA memberikan bantuan kepada negara penerima untuk mempercepat proses pelaksanaan bantuan hibah sehingga proyek tersebut dapat dilakukan secara lancar dan semestinya.[17]

3. *Kerjasama Teknik (Technical Cooperation)*

Kerjasama teknik adalah, kerjasama yang diberikan untuk membantu pengembangan SDM di negara-negara berkembang. Agar setiap negara dapat berkembang, mutlak diperlukan "upaya pembangunan manusia" yang akan memegang peranan didalam perkembangan sosial ekonomi. Agar teknik serta pengetahuan yang telah dibangun oleh Jepang dapat dialihkan kepada para teknisi dan pejabat dari negara berkembang, maka Jepang menerapkan cara dengan mengundang tenaga magang, mengirim tenaga ahli dan relawan, mengirim bantuan mesin dan peralatan, survey, atau kesemuanya ini tercakup

---

[17]

dalam bentuk "Proyek Kerjasama Teknik" dan lain-lain. Kerjasama teknik ini dilaksanakan oleh suatu badan pemerintah independen yang bernama, "Japan International Cooperation Agency (JICA)".

c. Sistim Penyaluran

Sistim penyaluran ODA Jepang dapat dibagi dua, yaitu :

1. **Bilateral** : *Government to Government.* Mekanismenya adalah bantuan diberikan secara langsung dari *Donor Country* kepada *Recipient Country.* Dalam hal ini hubungan bilateral yang baik dan bersahabat antara kedua negara seringkali berpengaruh terhadap kelancaran pemberian bantuan.

2. **Multilateral** : *Government to Multilateral Agencies to Recipient Countries.* Dalam hal ini ODA Jepang disalurkan melalui institusi-institusi keuangan internasional, yang antara lain IBRD (*World Bank*), IDA *(International Development Association*), IFC (*International Finance Cooperation*), ADB (*Asian Development Bank*), disamping kepada institusi tersebut, bantuan Jepang juga disalurkan melalui program-program (seperti program bantuan pangan, program bantuan pengungsi, program bantuan kesehatan) sesuai dengan institusi yang terkait.[18]

Namun pada perkembangannya orientasi bantuan ODA Jepang perlahan mulai berubah dan lebih komprehensif dengan disahkannya piagam ODA Jepang pada tanggal 30 Juni 1992, pemerintah Jepang mengesahkan piagam ODA baru yang lebih komprehensif dan akan dijadikan dasar pemberian bantuan ODA. Isi Piagam ODA

tersebut adalah bahwa ODA Jepang bertujuan memberikan kontribusi bagi perdamai dan pembangunan komunitas internasional, dan dengan demikian membantu menjam keamanan dan kemakmuran Jepang sendiri. Jepang sebagai salah satu negara yar terkemuka di dunia, bertekad untuk menggunakan sebaik-baiknya ODA dalam prakar mengatasi isu-isu pembangunan.[19]

C. ODA Jepang Untuk Indonesia

Filosofi ODA pada awalnya adalah sebagai ganti rugi pampasan perang yar dilakukan Jepang pada negara-negara jajahannya selalam PD II, termasuk kepa Indonesia. Satu periode penting yang menentukan perkembangan hubungan ked negara dan juga cikal bakal pemberian ODA Jepang untuk Indonesia diawali deng proses pembayaran pampasan perang pada tahun 1950-an serta pelaksanaannya pa tahun 1960-an.

1. Sejarah Awal Bantuan

Pada pertengahan tahun 1951, Amerika Serikat memprakarsai Perjanjian S Francisco (Treaty of San Francisco) untuk merundingkan perjanjian damai d pampasan perang antara Sekutu dengan Jepang. Beberapa negara dari Asia yang pa Perang Dunia II pernah diduduki Jepang, turut diundang menghadiri perunding Perjanjian tersebut ditandatangani oleh 49 negara dari 52 negara peserta pada September 1951 dan berlaku efektif mulai 28 April 1952.

Pada mulanya pemerintah Indonesia enggan turut mengikuti pertemuan tersebut, karena ingin terlebih dahulu mengadakan pembicaraan dengan negara-negara tetangga untuk menyatukan sikap terhadap Jepang. Karena itu, kabinet masih belum secara bulat menentukan pendiriannya. Menyikapi perundingan ini, Kabinet Sukiman-Suwirjo (27 April 1951-3 April 1952) terpecah. Menteri yang berasal dari Partai Buruh dan Partai Nasional Indonesia (PNI) menganggap tidak perlu ikut dalam perundingan karena tidak jelas manfaatnya. Tetapi menteri dari Masyumi, Partai Katolik, Partai Indonesia Raya (PIR), Faksi Demokratik, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Golongan Non Partai berpendirian bahwa tiba waktunya untuk menyelesaikan masalah yang masih mengganjal antara Indonesia dengan Jepang. Perbedaan pendapat antara dua partai terbesar, Masyumi dan PNI sempat mengancam keutuhan Kabinet. Akhirnya, pemerintah mengambil jalan tengah, bersedia hadir jika ada manfaatnya bagi Indonesia. Duta Besar RI di Washington ditugaskan menyampaikan nota kepada Pemerintah Amerika Serikat, bahwa Indonesia bersedia hadir dalam perundingan asalkan diberi jaminan akan memperoleh ganti rugi yang pantas dari Jepang.

Pada 24 Agustus 1951, Menteri Luar Negeri Achmad Soebardjo berangkat ke San Francisco, namun masih belum diberi kuasa untuk memutuskan. Pada 7 September 1951, beberapa jam sebelum acara penandatanganan Perjanjian Damai dilakukan, Kabinet masih belum berhasil mencapai kata sepakat mengenai langkah yang akan ditempuh. Kabinet pun mengambil suara. Hasilnya sepuluh menteri menyetujui

Pasca Perjanjian San Francisco, perjanjian bilateral Indonesia-Jepang mulai ditindaklanjuti. Mula-mula misi Menteri Perhubungan Juanda ke Jepang tahun 1952 menuntut pampasan perang sebesar US$17 miliar. Sebab, Indonesia kehilangan 4 juta jiwa selama pendudukan Jepang dan miliaran dollar AS dalam barang. Jepang kaget karena tuntutan itu sangat tinggi. Bahkan Kepala Biro Asia Deplu Jepang, Wajima Keiji menganggap Jepang tidak perlu bayar pampasan sebab tidak pernah perang dengan Indonesia. Akibatnya, sampai tahun 1955, hubungan kedua negara tegang karena soal pampasan. Perundingan berlangsung terus sampai tahun 1957. Sementara itu berdasarkan data *ppibaraki.wordpress.com*, Filipina telah memperoleh pampasan dari Jepang sebesar US$550 juta pada 9 Mei 1956 dan Burma (Myanmar) mendapat US$200 juta pada 5 November 1955. Indonesia menurunkan tuntutannya menjadi US$1 miliar. Akhirnya, akhir 1957 disepakati pampasan senilai US$800 juta, setengahnya dalam bentuk grant, setengahnya lagi sebagai bantuan ekonomi bersyarat ringan.[20]

Persetujuan ini dicapai karena peranan menentukan dari Adam Malik dan teman-temannya. Bersama-sama dengan Winoto Danuasmoro dan Elkana Tobing (dan setelah campur tangan Sukarno), Adam Malik dapat menembus rintangan dari perundingan resmi berkat hubungan eratnya dengan Shigetada Nishijima –pembantu Laksamana Maeda Tadashi Perwira Tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Indonesia. Nishijima punya jalur ke pimpinan partai LDP (Liberal Democratic Party) yang berkuasa. Bersama-sama dengan pengusaha terkenal Jepang, Ataru Kobayashi dan

[20] *Sejarah ODA Untuk Indonesia*. 2011. PPI Ibaraki.

omoyoshi Shirahata, Nishijima melicinkan jalan sehingga pada 20 Januari 1958 erjanjian pampasan perang ditandatangani.

Berdasarkan data *theglobalreview.com*, dalam perjanjian damai Jepang-ndonesia disepakati bahwa Jepang akan membayar ganti rugi berupa pampasan perang enilai US$223,080 juta; Jepang membatalkan tagihannya terhadap Indonesia sebesar JS$176,914 juta; Jepang bersedia menanamkan modalnya di Indonesia dan akan nengusahakan pinjaman jangka panjang sampai batas US$400 juta; pembayaran ampasan perang yang pertama dimulai sejak 1958 dan lunas dalam jangka waktu dua elas tahun dengan cicilan US$20 juta setiap tahun; pembayaran ganti rugi dapat ilakukan dalam bentuk barang atau jasa; kedua belah pihak akan menyusun daftar arang atau jasa yang akan diserahkan Jepang.[21] Perjanjian damai dan pampasan perang ersebut disahkan DPR RI tanggal 13 Maret 1958 dan diundangkan pada 27 Maret 1958.

Perjanjian pampasan perang inilah yang merupakan awal dari pemberian ODA epang untuk Indonesia dalam bentuk dana segar. Perjanjian tersebut terdiri atas satu laftar yang memuat enam kategori program dan proyek, tempat dana ODA akan ligunakan. Keenam kategori itu adalah transportasi dan komunikasi, pengembangan enaga, pengembangan industri, pengembangan pertanian dan perikanan, pertambangan, lan jasa atau pelayanan. Proyek bantuan yang didanai ODA ini juga menyangkut ransfer teknologi, dan investasi yang melibatkan sektor swasta untuk membangun

[21] *Pampasan Perang Perspektif Hubungan Bilateral Indonesia Jepang*. 2011. The Global Review.

ndustry-industri yang berorientasi ekspor serta membuka Jepang bagi impor barang bantuan.

2. Proyek-Proyek ODA

Proyek-proyek ODA sebagai bentuk kompensasi pampasan perang Jepang ini awalnya memiliki 36 proyek . Sampai tahun 1968, sebelas proyek belum selesai. Dari yang sudah selesai, 7 proyek tidak baik jalannya sehingga tinggal 18 proyek yang selesai. Beberapa di antaranya ada yang ternyata gagal, seperti pabrik kertas di Pematang Siantar dan Wisma Nusantara. Selain berupa fisik, ada juga ODA non-fisik di bidang kebudayaan dan pendidikan. Ada 378 mahasiswa dan 474 trainee Indonesia belajar di Jepang. Walaupun pemilihan awalnya didasarkan pada politik dan bukan berlandaskan prestasi akademis. Namun Jepang dengan ODAnya, akhirnya berhasil memberikan sumbangan untuk menciptakan suatu lapisan yang terdidik dan ahli di Indonesia.

Tabel 2.1.

Tabel Proyek-Proyek Besar Masa Awal Pemberian ODA Jepang di Indonesia (1959-1965)[22]

(dalam million US$)

Tahun	Nama Proyek	Jumlah Anggaran
1959-1961	Proyek Terowongan pengendali air Neyama, Jawa Timur	1.972
1960-1962	Proyek Hotel besar di Jakarta (Hotel Indonesia), Pelabuhanratu, Jawa Barat (Samudra Beach Hotel), Yogyakarta (Hotel Ambarukmo), dan Bali (Hotel	86. 847-

[22] *Proyek-Proyek Besar ODA Jepang Di Indonesia*. 2009.

	Bali Beach)	
1963-1965	Proyek 3K (Sungai Karangkates, Kali Konto, Sungai Kanan)	28,352
1964-1965	Proyek Jembatan Sungai Musi, Sumatera Selatan	11,782

Sumber : www.wartawarga,gunadarma.ac.id

Dari tabel diatas tampak proyek-proyek yang didanai ODA Jepang tersebut telah banyak memberikan aspek positif bagi Indonesia.Di antara proyek-proyek yang telah selesai dan berjalan efisien adalah sebuah jembatan yang melintasi Sungai Musi di Sumatera Selatan, yang diselesaikan pada Mei 1965 dengan biaya US$11,782 juta. Proyek lain yang sukses adalah terowongan pengendali air Neyama yang dibangun di Jawa Timur. Pembangunannya dikontrakkan pada 1959 dan diselesaikan pada April 1961 dengan biaya US$1,972 juta. Proyek pengembangan komprehensif di daerah Sungai Brantas di Jawa Timur juga merupakan proyek konstruksi terbesar di antara proyek-proyek yang dibiayai dengan ODA dan menjadi simbolnya. Proyek yang dikontrakkan pada 1963 ini disebut "Proyek 3K", yang mewakili nama-nama dari tiga sungai yang diawali dengan huruf K: Sungai Karangkates, anak sungai dari Kali Brantas; Kali Konto, satu cabang Sungai Brantas; dan Sungai Kanan. Ketiga proyek bendungan menghabiskan US$28,352 juta. Dan ketika ketiganya tidak dapat diselesaikan dengan biaya ini, tambahan kredit yen pun diberikan.

Proyek lainnya meliputi empat hotel besar di Jakarta (Hotel Indonesia), Pelabuhanratu Jawa Barat (Samudra Beach Hotel), Yogyakarta (Hotel Ambarukmo), dan Bali (Hotel Bali Beach). Hotel Indonesia berlantai 14 yang dibangun di Jakarta pada

1962 semula dimaksudkan untuk mengakomodasi para pemimpin dan wisatawan asing pada Asian Games tahun itu. Sampai 1969, hotel tersebut merupakan satu sumber devisa yang penting karena semua tamu diharuskan membayar rekening mereka dalam dolar Amerika. Beberapa proyek krusial berikutnya yang telah selesai adalah bantuan untuk korban gempa bumi di Yogyakarta, Tsunami di Aceh, Pengiriman dan Pelatihan Tenaga Pendidik Indonesia ke Jepang dan Peningkatan Kesehatan Reproduksi di Indonesia.

Tabel 2.2.
Tabel Proyek-Proyek ODA Jepang Untuk Indonesia
Periode 2010-2013[23]

(dalam million Yen)

Tahun	Nama Proyek	Jumlah Anggaran
2010-2011	Proyek rekonstruksi sekolah dasar di wilayah tempat pembuangan (sampah) akhir (TPA) di kecamatan Bantar Gebang, kota Bekasi, propinsi Jawa Barat	9,60
2010-2011	Proyek Pinjaman Yen Pembangunan Fasilitas Balai Pelatihan Kelautan	7,71
2010-2011	Proyek Pembangunan Kembali Sekolah yang Aman di Wilayah Bencana Gempa Lepas Pantai Padang Provinsi Sumatera Barat	5.49
2010-2012	Proyek Pengembangan Ramah Lingkungan dengan Aneka Pemanfaatan Jarak Pagar (Jatropha Curcas) di Indonesia (Tahap III)	4.32
2010-2012	Bantuan Hibah Darurat bagi Korban Bencana Tsunami di Kepulauan Mentawai dan Meletusnya Gunung Merapi di Pulau Jawa	5.00
2010-2011	Proyek Rehabilitasi Fasilitas PLTA skala kecil di desa Simanau dan desa Batu Bajanjan	3.16

[23] *Japan's ODA Projects in Indonesia under Different Assistance Schemes*. 2011. http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/en/projects.htm, diakses tanggal 1 Desember 2011.

2010-2013	Proyek Pengembangan Tehnik Pengaturan Suhu terhadap Lalat Buah pada Buah Mangga	4,84
2010-2011	Proyek Pinjaman Kebijakan Pembangunan ke-7	8,39
2011-2012	Proyek Pemanfaatan Dana Imbangan mengenai Putaran Kennedy Kedua (2KR – Second Kennedy Round) berupa "Bantuan untuk Petani yang Kurang Mampu"	25,86
2011-2013	Proyek Perbaikan Darurat Stasiun Pompa Drainase Pluit	74,37
2011-2013	Proyek Program Pengembangan Sektor Reformasi Infrastruktur (Tahap III)	82,91

Sumber : www.id.emb-japan.go.id

Tabel diatas menunjukkan besar anggaran dana untuk proyek-proyek ODA yang sedang dan masih dalam tahap pengerjaan dalam rentan waktu 2010-2012 adalah Proyek rekonstruksi sekolah dasar di wilayah tempat pembuangan (sampah) akhir (TPA) di kecamatan Bantar Gebang, kota Bekasi, propinsi Jawa Barat; Proyek Pinjaman Yen Pembangunan Fasilitas Balai Pelatihan Kelautan; Proyek Pembangunan Kembali Sekolah yang Aman di Wilayah Bencana Gempa Lepas Pantai Padang Provinsi Sumatera Barat; Proyek Pengembangan Ramah Lingkungan dengan Aneka Pemanfaatan Jarak Pagar (Jatropha Curcas) di Indonesia (Tahap III); Bantuan Hibah Darurat bagi Korban Bencana Tsunami di Kepulauan Mentawai dan Meletusnya Gunung Merapi di Pulau Jawa; Proyek Rehabilitasi Fasilitas PLTA skala kecil di desa Simanau dan desa Batu Bajanjan; Proyek Pengembangan Tehnik Pengaturan Suhu terhadap Lalat Buah pada Buah Mangga; Proyek Pinjaman Kebijakan Pembangunan ke-7; Proyek

Kennedy Round) berupa "Bantuan untuk Petani yang Kurang Mampu"; Proyek Perbaikan Darurat Stasiun Pompa Drainase Pluit; dan Proyek Program Pengembangan Sektor Reformasi Infrastruktur (Tahap III).

Tabel 2.3.
Tabel Data Pemberian ODA Jepang Untuk Indonesia
Periode Tahun 2000-2006[24]

(dalam million US$)

Tahun	Loan Aid	Grant Aid	Technical Cooperation	Total
2000	945.66	52.07	144.60	1,142.33
2001	702.83	45.16	117.27	865.26
2002	441.59	63.54	126.46	631.59
2003	946.77	82.36	120.66	1,149.79
2004	452.52	25.47	105.96	583.95
2005	1,072.18	172.21	98.40	1,342.79
2006	882.83	60.67	91.11	1,034.61
Total	**24,690.06**	**1,939.16**	**2,907.49**	**29,597.35**

Sumber : www.id.emb-japan.go.id

Tabel di atas menunjukkan besarnya dana bantuan ODA Jepang yang terus berlangsung pada tahun 2000-2006 tercatat Indonesia telah menerima bantuan ODA dari Jepang dengan total rincian : *Loan Assistance* sebesar 24,690.06 million US$; *Grant Aid* sebesar 1,939.16 million US$; *Technical Cooperation* sebesar 2,907.49 million US$; *Cultural Grant* sebesar 1,971.4 million Yen.[25] Jumlah angka penerimaan ODA Jepang untuk Indonesia adalah sangat signifikan. Salah satu puncak penerimaan tertinggi adalah

[24] *The Table Showing the Actual Amount of Assistance from Japan to Indonesia.* 2011. http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/en/datastat_01.htm, diakses tanggal 1 Desember 2011.

pada tahun 2005, yaitu di saat nilai perdagangan Jepang terhadap Indonesia mencapai USD24,9 miliar[26]. Hal ini secara otomatis membuat Jepang meningkatkan pemberian ODA untuk Indonesia dengan harapan peningkatan nilai perdagangannya menjadi lebih tinggi lagi di tahun-tahun mendatang . Hubungan dan kerja sama ekonomi Indonesia-Jepang juga ditandai pesatnya perkembangan perusahaan Jepang di Indonesia. Sekarang tidak kurang 1.000 perusahaan Jepang beroperasi di Indonesia yang mempekerjakan sekitar 200.000 orang. Bahkan pada tahun 2008-2009 Indonesia selalu masuk Top 3 Penerima Oda Jepang terbesar setelah Cina dan India. Dan pada tahun 2010 hingga Desember 2011, posisi ini berubah menjadi posisi puncak, dengan penerimaan sebesar 1.370 juta US$, disusul India dengan penerimaan sebesar 1.240 US$, dan Cina dengan penerimaan sebesar 1.200 US$.[27]

Dari penjelasan bab ini dapat disimpulkan bahwa proses terjadinya hubungan diplomatik Jepang-Indonesia baik dari pra maupun pasca kemerdekaan Republik Indonesia mengalami proses yang sangat panjang dan penuh dinamika dalam perkembangannya. Walau dalam prosesnya selalu saja ada masalah dan kendala, namun kedua Negara berhasil menjalin ikatan emas dalam hubungan tersebut. Kebijakan Jepang untuk memulai memberikan ODA bagi para negara-negara berkembang di dunia yang awalnya sebagian besar adalah bekas jajahannya, telah memberikan warna baru dalam hubungan diplomatik Negara Bunga Sakura tersebut. Meskipun sebagai aktor rasional,

---

[26] *50 Tahun Indonesia-Jepang*. Uni Sosial Demokrat. http://www.unisosdem.org/kliping_detail.php?aid=9324&coid=1&caid=27, diakses tanggal 1 Desember 2011.

tentu saja Jepang menjalankan kebijakan tersebut den

Indonesia, yang kemudian selalu memperoleh posisi

bantuan, telah mengalami kemajuan yang signifikan

nasionalnya. Sehingga Indonesia pun dapat dikat

hubungan diplomatik yang berjalan secara mutualisme